

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan salah satu faktor utama bagi pengembangan sumber daya manusia. Karena pendidikan diyakini mampu meningkatkan sumber daya manusia untuk menciptakan manusia produktif yang mampu memajukan bangsanya (Kunaryo, 2000: 21). Pendidikan dalam arti luas didalamnya arti luas terkandung pengertian mendidik, membimbing, mengajar, dan melatih. Dalam keseluruhan proses pendidikan di sekolah, kegiatan belajar merupakan kegiatan yang pokok (Darajat, 2000: 100). Menurut UU no. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 5 ayat 1 bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Pada pasal 1 ayat 26 disebutkan warga negara adalah warga negara Indonesia baik yang tinggal di Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya pada pasal 4 ayat 1, pendidikan dilaksanakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa”.

Dari beberapa hal tersebut bisa kita lihat bahwa pendidikan merupakan hal yang sangat diperhatikan oleh pemerintah dan harus

dipastikan sampai ke semua warga negara. Pendidikan merupakan faktor penting dalam kehidupan maka arah pendidikan masa depan harus mampu memberikan jalan pemecahan masalah bagi pembangunan yakni tersedianya sumber daya insan yang berkualitas sehingga mampu mengantisipasi setiap perubahan yang cepat (Soetarno, 2002: 1). Selain itu, pendidikan merupakan upaya yang dapat mempercepat pengembangan potensi manusia karena pendidikan dapat mempengaruhi perkembangan fisik, mental, emosional serta moral dan ketakwaan manusia (Sa'ud & Makmun, 2005: 6).

Pendidikan merupakan salah satu kunci penanggulangan kemiskinan dalam jangka menengah dan jangka panjang. Namun, sampai dengan saat ini masih banyak orang miskin yang memiliki keterbatasan akses untuk memperoleh pendidikan bermutu, hal ini disebabkan antara lain karena mahalny biaya pendidikan. Disisi lain, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar, yang dikenal dengan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. Pada pasal 34 ayat 2 tertera bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan, bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Keberhasilan pendidikan merupakan tanggungjawab bersama antara keluarga, anggota masyarakat, dan pemerintah. Pemerintah dan masyarakat menyediakan tempat belajar yaitu sekolah. Sekolah menampung siswa-siswinya dari berbagai macam latar belakang dan kondisi yang berbeda. Pada umumnya anak-anak yang berasal dari keluarga menengah ke atas mendapatkan pengarahan dan bimbingan yang cukup baik dari orang tua mereka, sedangkan anak-anak yang berasal dari keluarga ekonomi rendah kurang mendapat bimbingan dan perhatian yang cukup dari orang tua mereka karena orang tua mereka lebih memusatkan perhatiannya pada bagaimana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.

Konsekuensi dari hal tersebut maka pemerintah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/Mts serta satuan pendidikan yang sederajat). Seiring meningkatnya beban subsidi BBM yang harus dibayar pemerintah karena semakin meningkatnya harga minyak dunia, pada bulan Maret dan Oktober 2005 Pemerintah melakukan pengurangan subsidi BBM secara drastis. Masyarakat langsung merasakan dampak kenaikan harga BBM berupa melambungnya kebutuhan pokok dan pendidikan. Dalam rangka mengatasi dampak kenaikan harga BBM, pemerintah merealokasikan anggarannya ke empat program besar, yaitu program pendidikan, kesehatan, infrastruktur pedesaan, dan Subsidi Langsung Tunai (SLT). Sebagai konsekuensi dalam bidang pendidikan, maka pemerintah selain mengeluarkan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

yang bertujuan untuk meringankan beban biaya pendidikan yang dibayar oleh masyarakat dengan tetap mempertahankan mutu pendidikan. *Panduan Pemantauan Program Penanggulangan Kemiskinan, TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) 2012.*

Setelah Pemerintah menetapkan kebijakan BOS sebagai salah satu pendukung untuk menuntaskan program Wajar Dikdas 9 Tahun, ternyata kebijakan BOS tersebut belum mampu menjamin seluruh masyarakat untuk dapat sekolah, terutama bagi anak-anak usia sekolah yang berasal dari keluarga miskin. BOS yang diberikan kepada lembaga penyelenggara Wajar Dikdas setara SD/MI dan SMP/MTs, hanya mampu mengurangi beban biaya pendidikan yang harus dikeluarkan masyarakat, tetapi tidak mampu untuk membebaskan seluruh biaya pendidikan, sehingga banyak siswa miskin yang tidak sanggup atau melanjutkan pendidikannya karena harus mengeluarkan biaya untuk buku, transportasi, seragam madrasah, sepatu, buku tulis atau biaya lainnya yang tidak dapat dipenuhi dari dana BOS. Sementara kita semua melihat bahwa mayoritas siswa berasal dari keluarga kurang mampu bahkan dapat dikategorikan miskin.

Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang diberikan kepada sebagian siswa miskin di tingkat Sekolah Dasar/MI hingga Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/MA, walaupun jumlah siswa yang mendapatkan bantuan ini masih sangat terbatas akan tetapi dengan program BSM ini, diharapkan dapat membantu sebagian siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu/miskin di dalam membiayai

sebagian kebutuhan pendidikannya, sehingga dapat menyelesaikan pendidikannya, bahkan dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya.

Bantuan Siswa Miskin (BSM) merupakan bantuan langsung kepada siswa yang berdasarkan kondisi ekonomi siswa dan bukan bukan berdasarkan beasiswa prestasi. BSM diberikan kepada siswa dari keluarga kurang mampu, BSM memberi peluang bagi siswa untuk mengikuti pendidikan di level yang lebih tinggi. Selain itu, bertujuan untuk mengurangi jumlah siswa putus sekolah akibat permasalahan biaya pendidikan. Kebijakan bantuan BSM bertujuan agar siswa dari kalangan tidak mampu dapat terus melanjutkan pendidikan di sekolah. Program ini bersifat bantuan bukan beasiswa, karena jika beasiswa bukan berdasarkan kondisi ekonomi siswa, melainkan berdasarkan prestasi. Bantuan Siswa Miskin merupakan salah satu bentuk kompensasi pemerintah atas kenaikan harga BBM untuk sektor pendidikan di mana bantuan ini ditujukan untuk siswa kurang mampu agar dapat bertahan dan melanjutkan pendidikannya yang dalam penetapan penerimanya diseleksi oleh pemerintah daerah setempat.

Melalui Program BSM, diharapkan anak usia sekolah dari rumahtangga/keluarga miskin dapat terus bersekolah, tidak putus sekolah, dan di masa depan diharapkan mereka dapat memutus rantai kemiskinan yang saat ini dialami orangtuanya. Program BSM juga mendukung komitmen pemerintah untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan di Kabupaten/Kota miskin dan terpencil serta pada kelompok marjinal.

Program BSM adalah salah satu alasan rendahnya partisipasi pendidikan khususnya pada kelompok miskin. Tingginya biaya pendidikan baik biaya langsung maupun tidak langsung. Biaya langsung meliputi antara lain iuran sekolah, buku, seragam, dan alat tulis, sementara biaya tidak langsung meliputi antara lain biaya transportasi, kursus, uang saku dan biaya lain-lain. Keadaan tersebut tentu sangat berpengaruh pada rendahnya angka partisipasi pendidikan penduduk miskin terutama disebabkan oleh banyaknya putus sekolah dan angka tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang berikut. Hal tersebut didukung oleh data SUSENAS BPS yang mengungkapkan bahwa terjadinya putus sekolah sebagian besar disebabkan oleh alasan ekonomi baik karena tidak memiliki biaya maupun karena anak harus bekerja. Hal tersebut jelas mengungkapkan bahwa penduduk miskin tidak akan mampu menjangkau pendidikan jika tidak dibantu oleh pemerintah.

BSM adalah bantuan yang diberikan kepada siswa dari keluarga kurang mampu atau pra sejahtera untuk dapat melakukan kegiatan belajar di sekolah. BSM berupaya meringankan biaya pendidikan siswa, bisa dalam bentuk pembiayaan iuran bulanan sekolah dan atau pembelian perlengkapan belajar siswa, dan atau transportasi siswa ke sekolah.

Di jenjang pendidikan tinggi, program beasiswa bagi anak kurang mampu juga digulirkan pemerintah dengan nama bantuan belajar mahasiswa miskin ber IPK 2,5, dan beasiswa bidik misi. Bidik misi bertujuan untuk meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi peserta

didik yang berpotensi akademik memadai dan kurang mampu secara ekonomi.

Program bantuan tersebut diambil sebagai salah satu langkah penanggulangan kemiskinan, di mana salah satu yang dianggap dapat mengurangi kemiskinan dalam jangka panjang. Dengan pendidikan yang lebih memadai dan merata diharapkan masyarakat akan lebih dapat bersaing dan dalam jangka panjang dapat meningkatkan taraf kehidupannya menjadi lebih baik khususnya untuk masyarakat golongan ekonomi lemah. Jumlah siswa yang mendapatkan BSM ditetapkan oleh pemerintah pusat berdasarkan indeks kemiskinan. Setiap sekolah yang mendapatkan kuota penerima bantuan melakukan seleksi tertentu untuk menetapkan penerima bantuan, selanjutnya bantuan tersebut dialokasikan langsung kepada siswa penerima bantuan.

Dalam pemberian dana BSM diharapkan dapat mengurangi beban perekonomian masyarakat miskin, sehingga mereka dapat melanjutkan pendidikannya. Begitu pentingnya pendidikan bagi kemajuan bangsa, diharapkan pemberian BSM dapat membantu semangat untuk bersekolah pada masyarakat ekonomi lemah dan mengurangi jumlah siswa putus sekolah.

Berkaitan dengan masalah diatas, maka peneliti berencana akan mengadakan penelitian pada sekolah swasta yang terletak di tengah jantung kota yaitu di SMP Muhammadiyah 8 Wonogiri. Dengan alasan, masih

banyaknya siswa yang belajar di sekolah tersebut berasal dari ekonomi menengah ke bawah dan dari keluarga kurang mampu.

Jumlah Siswa tahun 2013 SMP Muhammadiyah 8 Wonogiri yang terdiri dari kelas 7, 8, 9 berjumlah 26, 37, 37. Dari jumlah 100 siswa hanya 1 siswa yang orang tuanya sebagai PNS lainnya swasta dan buruh, sementara yang mendapat BSM dari APBN 20 siswa, APBD 4 siswa.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Bagaimana Pengelolaan BSM di SMP Muhammadiyah 8 Wonogiri?". Kemudian dari rumusan masalah tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Persiapan Pengelolaan BSM di SMP Muhammadiyah 8 Wonogiri?
2. Bagaimana Pelaksanaan Pengelolaan BSM di SMP Muhammadiyah 8 Wonogiri?
3. Bagaimana Pelaporan Pengelolaan BSM di SMP Muhammadiyah 8 Wonogiri?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai peneliti oleh peneliti.

1. Tujuan Umum

Penelitian bertujuan mendeskripsikan pengelolaan BSM di SMP Muhammadiyah 8 Wonogiri.

2. Tujuan Khusus

- a. Penelitian bertujuan mendeskripsikan persiapan pengelolaan BSM di SMP Muhammadiyah 8 Wonogiri?
- b. Penelitian bertujuan mendeskripsikan pelaksanaan pengelolaan BSM di SMP Muhammadiyah 8 Wonogiri?
- c. Penelitian bertujuan mendeskripsikan pelaporan pengelolaan BSM di SMP Muhammadiyah 8 Wonogiri?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman tentang pengelolaan dana BSM.
- b. Penelitian ini diharapkan sebagai acuan bahan dalam pengelolaan BSM.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan dalam persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan pengelolaan BSM.
- b. Penelitian ini untuk memberikan masukan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan BSM.
- c. Penelitian ini untuk memberikan kontribusi sumbangan pemikiran dalam rangka perbaikan sistem pengelolaan BSM.

E. Daftar Istilah

1. Pengelolaan

Pengelolaan atau manajemen meliputi: perencanaan, sumber keuangan, pengalokasian, penganggaran, pemanfaatan dana, pembukuan keuangan, pemeriksaan dan pengawasan, pertanggungjawaban dan pelaporan.

2. Bantuan Siswa Miskin

Program BSM adalah Program Nasional yang bertujuan untuk menghilangkan halangan siswa miskin berpartisipasi untuk bersekolah dengan membantu siswa miskin memperoleh akses pelayanan pendidikan yang layak, mencegah putus sekolah, menarik siswa miskin untuk kembali bersekolah, membantu siswa memenuhi kebutuhan dalam kegiatan pembelajaran, mendukung program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (bahkan hingga tingkat menengah atas), serta membantu kelancaran program sekolah.